PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar Hari: Kamis Tanggal: 16 September 2021 Halaman: 1

Keluhkan PeduliLindungi dan CHSE

Tampin Batal Ikut Uji Coba Pembukaan Objek Wisata

JOGJA, *Radar Jogja* - Penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan sertifikat *Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability* (CHSE) yang diberikan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) masih membuat bingung. Penggunaan aplikasi dan sertifikat tersebut masih menyisakan beberapa masalah. Termasuk di DIJ.

Koordinator Bidang Penegakan Hukum Satgas Covid-19 DIJ Noviar Rahmad menyebutkan, di DIJ masih banyak pihak yang belum paham soal penggunaan PeduliLindungi. Termasuk mereka yang wajib menyediakan *QR Code* untuk bisa dilakukan *scan* pada aplikasi tersebut

▸ Baca **Keluhkan...** *Hal 3*

Sambungan dari hal 1

Seperti hotel, pusat perbelanjaan, toko klontong, restoran, dan beberapa tempat yang lain. Menurut Noviar, banyak dari mereka yang masih belum paham bagaimana cara mendapatkan *QR Code* tersebut. "Sebagian besar belum punya *QR Code*, banyak dari mereka yang juga belum paham," ujar Noviar, kemarin (15/9).

Padahal, lanjut dia, sepekan sebelum 14 September pihaknya, saat penerapan aturan, sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. "Tapi rupanya masih banyak juga yang belum paham," lanjutnya.

Menurut Noviar, para pengusaha tersebut harus mendaftarkan *QR Code* mereka ke Kemenkes melalui daring. Lalu Kemenkes akan membalas permintaan pendaftaran tersebut. Kemudian, *QR Code* bisa dipasang di lokasi mereka.

Noviar menyatakan saat ini delapan mal besar yang ada di DIJ sudah bisa menerapkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Sementara beberapa hotel juga sudah bisa melakukan hal tersebut. "Sisanya masih dalam proses," tandasnya.

Imam, salah satu pemilik toko klontong di Sleman menyatakan sampai saat ini pihaknya masih bingung soal penggunaan QR Code pada aplikasi PeduliLindungi. Apalagi menurut dia, tak semua pelanggan yang berbelanja di tokonya memiliki telepon pintar. "Kalau misalnya orang tua yang ga punya hape itu gimana ya saya juga masih bingung ini," jelasnya.

Kelemahan lainnya, terkait tak adanya pengecekan identitas. Salah seorang warga Klaten, yang enggan namanya dikorankan, mengaku meski belum megikuti vaksinasi tetap bisa masuk mal. Caranya dengan menggunakan nomor identitas rekannya saat mengakses PeduliLindungi. "Kan Cuma scan aplikasi, tidak dicek kesamaan identitasnya," kata dia.

Selain itu, seluruh destinasi wisata dan tempat keramaian umum saat tengah disibukkan juga untuk bisa mendapatkan QR Code PeduliLindungi. Sementara, tidak sedikit laporan masuk yang diterimanya bahwa pengajuan QR Code pada aplikasi itu cukup sulit. "Saya mendapatkan banyak pertanyaan (PeduliLindungi) kok lama, sulit dan memang harus dicoba terus," kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Jogja, Wahyu Hendratmoko ditemui di Hotel Tara.

Persoalan lainnya, terkait sertifikat CHSE. Yang membuat Taman Pintar (Tampin) belum bisa menggelar uji coba pembukaan objek wisata. Karena ternyata belum mengantongi CHSE. Wahyu mengatakan sertifikat CHSE menjadi salah satu piranti yang wajib dipunyai pelaku pariwisata selain aplikasi peduli lindungi. Sejauh ini, belum semua destinasi wisata di kota Jogja memiliki legalitas dari pemerintah pusat itu. "Secara keseluruhan, destinasi wisata di kota ada yang sudah mengantongi (CHSE), tapi ada juga yang belum," katanya.

Wahyu menjelaskan destinasi wisata yang belum mengantongi CHSE bukan karena tidak menerapkan, melainkan ada kendala teknis dalam pendaftarannya. Pun sampai saat ini tengah proses pengecekan di lapangan. "Ada dokumen yang belum bisa dilengkapi. Tapi sedang diupayakan," ujarnya.

Contohnya seperti Tampin, yang kemudian direvisi belum bisa menggelar uji coba pembukaan kembali wisata lantaran belum memiliki CHSE. Sekalipun, wahana tersebut sudah ketat didalam menerapkan protokol kesehatan dan mengatur SOP kunjungan. Namun, belum bisa menjadi acuan untuk membuka. "Sangat disayangkan Tampin direvisi karena belum punya CHSE," sesalnya.

Menurut mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Jogja itu, untuk pembukaan wisata ke depan harus memiliki legalitas CHSE. Meskipun, ini menjadi penilaian kedua setelah aplikasi peduli lindungi. Makanya, didorong seluruh pelaku wisata segera melakukan upaya pendaftaran CHSE kepada Kemenparekraf. Terlebih, sebagai persiapan ketika nantinya PPKM kembali turun ke level 2 maka semua tempat wisata diperbolehkan dibuka. Tetapi dengan kapasitas 50 persen dan wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi serta menerapkan prokes ketat. "Karena yang merekomendasikan (dibuka) adalah Kemenparekraf jadi yang dipakai CHSE itu," terangnya yang menyebut destinasi wisata yang sudah mulai uji coba dibuka pada PPKM Level 3 baru GL Zoo karena sudah mengantongi CHSE. **(kur/wia/pra/fj)**

Sebagian besar belum punya QR Code, banyak dari mereka yang juga belum paham. "

NOVIAR RAHMAD
Koordinator Bidang Penegakan Hukum Satgas Covid-19 DIJ

Saya mendapatkan banyak pertanyaan (PeduliLindungi) kok lama, sulit dan memang harus dicoba terus. "

WAHYU HENDRATMOKO
Kepala Dinas Pariwisata Kota Jogja

HERI KURNIAWAN/RADAR JOGJA

WINDA ATIKA IRA/RADAR JOGJA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata 2. Dinas Kebudayaan 3. UPT. Pengelolaan Taman Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005